

PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN SLEMAN

Rofi Ardiyanto¹; Nailul Amany²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dalam pengawasan tenaga kerja asing serta koordinasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan lembaga pemerintah terkait dalam mengawasi pelaksanaan penggunaan tenaga kerja asing, terutama dalam perizinan yang ada di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Bahan penelitian yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden, sementara data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Metode kualitatif digunakan dalam menyusun dan menganalisis data yang telah diperoleh.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pengawasan dalam beberapa tahapan, yaitu preventif edukatif yang dilakukan untuk mencegah, represif non-yustisial melalui pemberian teguran tertulis atau lisan, dan represif yustisial yang dilakukan melalui tahapan pengadilan.

Koordinasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pengawasan tenaga kerja asing dilakukan melalui Tim Pengawasan Orang Asing dan berperan untuk bertukar informasi dan juga berpartisipasi dalam operasi gabungan.

Pengawasan dan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya pengawasan terhadap tenaga kerja asing di Kabupaten Sleman sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun masih belum maksimal dan memiliki kekurangan dalam melaksanakan pengawasan seperti halnya kurangnya pegawai pengawas, seperti kurang maksimalnya sistem *online* yang menangani tenaga kerja asing, dan juga hilangnya data.

Kata kunci: tenaga kerja asing, pengawasan ketenagakerjaan, perizinan tenaga kerja asing

¹ Mahasiswa Strata Satu (S-1) Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

THE ROLE OF LABOUR AND TRANSMIGRATION AUTHORITY OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA IN INSPECTING ON THE UTILIZATION OF FOREIGN LABOUR IN SLEMAN REGENCY

Rofi Ardiyanto¹; Nailul Amany²

ABSTRACT

This legal research intends to understand the role and coordination of the Labour and Transmigration Authority of the Special Region of Yogyakarta with other relevant authorities in inspecting the employment of foreign labour, particularly in terms of licensing, in Sleman Regency.

This legal research is a normative-empirical legal research, with materials that are consisted of primary and secondary data. Primary data are obtained from respondents through interview, while secondary data are collected from literature research. This legal research utilizes qualitative research methods to arrange and analyze data that are collected for this legal research's purposes.

The Labour and Transmigration Authority of the Special Region of Yogyakarta performs their supervision in several stages: the first being the educative preventive stage which is performed to prevent; second, the non-justicial repressive stage, carried out through the provision of written or verbal reprimands; and finally the justicial repressive stage, in which matters are taken to the court.

The Labour and Transmigration Authority of the Special Region of Yogyakarta's coordination in performing foreign labour inspection is administered by the Foreigner Oversight Team and plays a role in exchanging information and also participating in joint operations.

The inspection and coordination with other relevant governmental authorities by the Labour and Transmigration Authority of the Special Region of Yogyakarta to inspect foreign labour in Sleman Regency have been conducted in line with national and regional regulations, although there is room for improvements in some aspects, such as the lack of inspectors for the Labour and Transmigration Authority itself, the inadequate online system that manages foreign workers in Indonesia, and the loss of data on foreign workers.

Keywords: foreign labour, labour inspection, foreign labour licensing

¹ Undergraduate Student of Civil Law Department in Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Lecturer of Civil Law Department in Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.